

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Gorontalo



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2020 BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Gorontalo, 18 Desember 2020

Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga No 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, Pukul 15.00 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk Semester II Tahun 2020.

Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk Semester II Tahun 2020 dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, Kepala Subauditorat Pemeriksaan, Sarjono, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R. A. Jusuf, Gubernur Gorontalo, diwakili, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardi Sidiki, Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Halid Tangahu, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, diwakili, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, diwakili, Walikota Gorontalo, Marthen Taha, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, Bupati Pohuwato, diwakili, dan Bupati Gorontalo diwakili.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2020 yang diserahkan antara lain :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Instansi terkait lainnya di Gorontalo;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan Instansi terkait lainnya di Gorontalo;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (s.d 30 Oktober) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan
4. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 S.D. Semester I 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato Dan Instansi Terkait Lainnya di Marisa.
5. Pemeriksaan kinerja atas Manajemen Pengendalian Banjir.

Dwi Sabardiana dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam rangka merespon kebijakan pemerintah dalam menangani wabah Pandemi COVID-19, sesuai kewenangan konstitusionalnya, BPK melaksanakan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19.

Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah difokuskan pada pengelolaan dan pertanggung jawaban belanja pegawai, belanja barang dan

jasa, belanja hibah dan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Gorontalo periode TA 2020 (s.d. Oktober).

Sasaran Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Kabupaten Pohuwato adalah pengelolaan SPBE yang menekankan pada aspek tata kelola dalam rangka penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik periode Tahun Anggaran 2019 s.d 2020 (s.d. Semester I).

Pemeriksaan kinerja atas Manajemen Pengendalian banjir dilaksanakan sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya nomor 11 adalah menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Pemeriksaan ini berfokus pada area (1) Kepatuhan terkait penataan ruang; dan (2) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

Dalam kesempatan itu Dwi Sabardiana juga menyampaikan permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan oleh BPK. Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas penanganan pandemi Covid-19 antara lain ditemukan permasalahan berikut:

1. Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo untuk menyediakan jejaring laboratorium dalam rangka penemuan kasus COVID-19 belum memadai;
2. Penatalaksanaan pengambilan dan pengiriman spesimen oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo dalam rangka penemuan kasus COVID-19 belum memadai;
3. Penemuan Kasus COVID-19 secara aktif dalam rangka mengendalikan pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memadai;
4. Manajemen klinis dalam rangka mengendalikan pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo belum memadai; dan
5. Penerbitan Regulasi terkait penerapan disiplin protokol kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo belum didukung oleh petunjuk pelaksanaan yang jelas.
6. Upaya pencegahan COVID-19 melalui promosi kesehatan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan pemeriksaan kepatuhan penanganan pandemi COVID-19, antara lain ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Rasionalisasi belanja daerah untuk penanganan COVID-19 belum sepenuhnya sesuai ketentuan serta sebagian hasil *refocussing* dan realokasi anggaran dialokasikan untuk belanja yang tidak berkaitan dengan penanganan COVID-19;
2. Pengadaan bahan kebutuhan pokok pada kegiatan pasar kebutuhan pokok bersubsidi Tahun 2020 yang dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) belum sesuai ketentuan;
3. Verifikasi dan validasi data penerima serta pengelolaan Bantuan Langsung Pangan Daerah atau BLPD belum memadai.
4. Rasionalisasi Belanja Daerah Untuk Penanganan COVID-19 Tidak Sesuai Ketentuan;
5. Realisasi belanja modal alat kesehatan di RSUD Toto Kabila yang termasuk dalam program *refocussing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 belum dimaksimalkan untuk

penanganan COVID-19; dan

6. Pengelolaan Tambah Uang Persediaan Belanja Tak Terduga penanganan COVID-19 belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Berdasarkan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas Belanja Daerah yaitu Belanja Barang dan Jasa (selain belanja penanganan Pandemi Covid-19), Belanja Hibah, dan Belanja Modal TA 2020 (s.d. 30 Oktober) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, antara lain ditemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

1. Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai kondisi senyatanya pada 19 Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp580,23 juta;
2. Kekurangan Volume pada Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Rumah Hunian Layak Bagi Masyarakat Miskin TA 2020 sebesar Rp179,72 juta; dan
3. Kekurangan volume atas pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp487,57 juta.

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas pengelolaan SPBE menunjukkan adanya permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan instansi terkait lainnya di Marisa. Permasalahan tersebut antara lain Pemerintah Kabupaten Pohuwato:

1. Belum memperkuat regulasi/kebijakan terkait pengembangan dan percepatan penerapan SPBE,
2. belum sepenuhnya menyediakan Jaringan Intra Pemerintah yang memadai untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE,
3. belum sepenuhnya merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan aplikasi untuk mendukung penerapan SPBE; dan
4. belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara terencana dan periodik.

Sedangkan untuk Hasil pemeriksaan BPK atas Manajemen Pengendalian Banjir pada Kota Gorontalo menunjukkan adanya permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas manajemen pengendalian banjir yaitu terkait dengan penegakan peraturan tata ruang dalam mengendalikan banjir yang belum sepenuhnya optimal dan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang belum memadai

Menutup sambutannya Dwi Sabardiana berharap Pemerintah Daerah terkait antara lain Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat memberikan perhatian yang serius dengan segera segera melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dalam waktu 60 hari, sesuai yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (htu/gto)